Kritik Terhadap Pernyataan Sekjen Kemendiktitisaintek

Kampus atau Pabrik: Saat Ilmu Harus Laris agar Diakui

~BORNEO PROGRESS~

Pada tanggal 26 April 2026, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan bahwa pemerintah akan menutup program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Wacana ini disampaikan dalam Simposium Kependudukan 2026 di Badung, Bali. Rencana untuk menata ulang bahkan menghentikan program studi yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan industri, sesuai dengan yang dikemukakan dalam wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sesungguhnya membuka perdebatan yang lebih luas dari sekadar efisiensi pendidikan. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keberlanjutan jurusan tertentu, melainkan juga arah dasar pendidikan tinggi itu sendiri: apakah akan tetap menjadi ruang pencarian pengetahuan, atau bergeser menjadi instrumen yang memproduksi tenaga kerja.

Perubahan arah pendidikan ini dapat dipahami melalui sudut pandang **Ekonomi Politik**. Dalam tradisi pemikiran Karl Marx, terdapat konsep *komodifikasi*, yaitu proses ketika sesuatu yang awalnya memiliki nilai guna karena fungsi dan maknanya berubah menjadi barang yang dinilai berdasarkan kemampuan untuk dipertukarkan di pasar (Karl Marx-1867). Jika kerangka ini diterapkan pada pendidikan tinggi, maka ilmu pengetahuan tidak lagi dihargai karena kemampuannya untuk menjelaskan dunia atau membentuk kesadaran kritis, melainkan karena potensinya menghasilkan keuntungan ekonomi.

Gejala tersebut tidak muncul secara tiba-tiba dalam ruang hampa. Ia berkembang seiring meningkatnya tuntutan agar universitas lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan, tuntutan ini memang tidak sepenuhnya keliru. Negara membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, sementara industri memerlukan tenaga kerja yang siap berkontribusi. Namun, persoalan muncul ketika tuntutan tersebut menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Pada titik ini, universitas mulai kehilangan fungsi reflektifnya dan lebih berperan sebagai penyedia tenaga kerja terlatih.

Transformasi ini tampak jelas dalam praktik sehari-hari. Kurikulum dirancang untuk menyesuaikan diri dengan deskripsi industri, bukan lagi untuk membangun kerangka berpikir yang luas. Program magang dan sertifikasi profesional menjadi indikator utama kualitas pendidikan, sementara ruang diskusi yang bersifat eksploratif kerap dianggap tidak produktif. Secara perlahan, orientasi pendidikan bergeser dari pembentukan intelektual menjadi pelatihan keterampilan teknis.

Dampak dari pergeseran ini juga terlihat pada posisi disiplin ilmu tertentu. Bidang-bidang yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan industri sering kali dipandang kurang relevan. Filsafat, sejarah, dan ilmu sosial kritis kerap berada dalam posisi rentan karena dianggap tidak memberikan kontribusi ekonomi secara langsung. Padahal, disiplin-disiplin tersebut memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir analitis, memahami dinamika sosial, serta menilai implikasi etis dari perkembangan teknologi dan ekonomi.

Dalam kerangka pemikiran Karl Marx, kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan konsep fetisisme komoditas. Dalam konteks pendidikan, fenomena ini tercermin

pada kecenderungan untuk menilai kualitas universitas melalui indikator kuantitatif seperti tingkat penyerapan kerja atau besaran gaji lulusan. Angka-angka tersebut kemudian diperlakukan seolah-olah mewakili keseluruhan kualitas pendidikan, padahal proses pembelajaran yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, perkembangan kemampuan berpikir, serta pembentukan nilai-nilai sosial menjadi sulit diukur dan akhirnya terabaikan.

Lebih jauh, orientasi yang terlalu kuat pada kebutuhan pasar berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Kebutuhan industri yang bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi global. Program studi yang dianggap relevan hari ini bisa saja kehilangan relevansinya dalam waktu singkat. Jika universitas hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, maka ia akan selalu berada dalam posisi reaktif, bukan proaktif. Lulusan yang dihasilkan mungkin siap untuk pekerjaan tertentu, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Selain itu, penekanan pada spesialisasi yang sempit dapat mengurangi kemampuan lintas disiplin yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kompleks. Isu-isu seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan ketimpangan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu saja. Mereka memerlukan pendekatan yang menggabungkan perspektif teknis, sosial, dan etis. Tanpa dasar yang kuat dalam ilmu-ilmu dasar dan humaniora, kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut menjadi terbatas.

Meski demikian, penting untuk menegaskan bahwa kritik terhadap komodifikasi pendidikan bukan berarti menolak hubungan antara universitas dan industri. Kolaborasi antara keduanya sangat diperlukan, terutama dalam mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang menjadi persoalan adalah ketika hubungan tersebut bersifat satu arah, di mana universitas hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan industri tanpa memiliki ruang untuk menentukan arah pengembangan ilmu secara mandiri.

Dalam situasi yang lebih seimbang, universitas seharusnya dapat berperan sebagai mitra kritis bagi industri. Artinya, selain memenuhi kebutuhan tenaga kerja, universitas juga memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dampak sosial dan etis

dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan industri tidak bersifat subordinatif, melainkan dialogis.

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan perubahan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Kurikulum perlu dirancang dengan menggabungkan dimensi teoritis dan praktis secara seimbang. Mahasiswa tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan analitis dan reflektif. Program lintas disiplin perlu diperkuat untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai bidang ilmu. Selain itu, indikator keberhasilan pendidikan harus diperluas agar tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap kehidupan sosial dan budaya.

Pada akhirnya, arah pendidikan tinggi akan ditentukan oleh pilihan kebijakan dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Jika nilai yang dominan adalah efisiensi ekonomi, maka universitas akan semakin menyerupai pabrik yang menghasilkan tenaga kerja sesuai permintaan pasar. Namun, jika pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia yang utuh yang mampu berpikir, memahami, dan bertindak secara bertanggung jawab maka universitas akan tetap menjadi ruang yang otonom dan kritis.

Dalam konteks ini, wacana penataan jurusan seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai upaya teknis, tetapi sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang tujuan pendidikan. Keputusan untuk mempertahankan atau menutup suatu program studi perlu mempertimbangkan tidak hanya manfaat ekonominya, tetapi juga kontribusinya terhadap pengembangan pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Tanpa pertimbangan tersebut, risiko yang dihadapi bukan hanya penyempitan pilihan akademik, tetapi juga berkurangnya kapasitas kolektif untuk memahami dan merespons perubahan sosial yang semakin kompleks.